

The Effect of Islamic Rural Banks (BPRS) on Regional Economies in Java

Mauizhotul Hasanah, Faris Kurnia Hakim, Siti Zulaikha

Faculty of Economic and Business, Airlangga University

Email: hasanahidzoh@gmail.com

Abstract: *The financial sector in a region can spur the pace of economic movements, especially with the contribution of banks in the micro sector as an intermediary tool in channeling funds to productive investments that encourage the real sector, especially in the micro sector, which will produce aggregate output. The purpose of this study is to analyze the extent of the Islamic Rural Bank (BPRS), which is an Islamic microfinance institution for the economy on the island of Java. This study uses secondary data during the period from January 2016 to December 2018. This study uses the Ordinary Least Square Data Panel method. The empirical results show that part of Total Assets does not have a significant negative effect on GRDB. While the total financing and Third Party Funds (TPF) partially does not have a significant positive effect on GRDB. Also, simultaneously the overall independent variables together have a significantly positive effect on GRDB.*

Keywords: *BPRS, Regional Economic, Java Island.*

Abstrak: Sektor keuangan di suatu daerah dapat memacu laju pergerakan ekonomi, khususnya dengan adanya kontribusi perbankan di sektor mikro sebagai alat intermediasi dalam menyalurkan dana pada investasi produktif yang mendorong sektor riil khususnya di sektor mikro sehingga akan menghasilkan output pertumbuhan secara agregat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkeekonomian di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama periode Januari 2016 hingga Desember 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi panel data. Hasil empiris menunjukkan secara parsial dari Total Aset tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap GDRB. Sedangkan total pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap GDRB. Selain itu, secara simultan keseluruhan variabel independen bersama-sama berpengaruh positif secara signifikan terhadap GDRB.

Kata Kunci: BPRS, Ekonomi Regional, Pulau Jawa.

PENDAHULUAN

Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar (UUD) No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam perencanaan investasi dan pengembangan daerahnya masing-masing demi mencapai pertumbuhan ekonomi regional yang optimal. Kemajuan suatu

daerah dapat dilihat dari pencapaian pembangunan daerah, dimana hasil dari pembangunan daerah tersebut dapat membentuk pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal. Pada tahun 2018 di Indonesia, daerah yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) didominasi oleh provinsi di pulau Jawa (BPS, 2018).

Gambar 1. Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Tahun 2018 (persen)



Oleh: (BPS, 2018)

Berdasarkan gambar 1 pulau Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 58,48%, kemudian pulau Sumatra sebesar 21,58%, Pulau Kalimantan sebesar 8,20%, pulau Sulawesi sebesar 6,22%, dan pulau-pulau lainnya sebesar 5,52%. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang setara dengan separuh penduduk Indonesia memiliki perputaran ekonomi tertinggi di Indonesia yang tumbuh 5,72% lebih tinggi dari tahun 2017. Menurut kajian ekonomi regional pertumbuhan pulau Jawa didorong oleh beberapa hal yaitu peningkatan konsumsi swasta dan pemerintah, lapangan usaha, perbaikan ekspor luar negeri, dan Investasi (Bank Indonesia, 2018)

Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa dengan perolehan tertinggi tak lepas dari strategi dan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian regional yaitu dalam meningkatkan daya pertumbuhan ekonomi dan mengatur penyediaan barang publik, stabilisasi pengangguran, mengurangi inflasi, pemerataan, peran tersebut dilakukan melalui dua sektor yaitu sektor riil (sektor barang) dan sektor moneter (sektor keuangan) (Supartoyo *dkk.*, 2018). Sektor keuangan memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi regional. Menurut teori *endogenous growth* (Solow), pertumbuhan ekonomi atau output di dorong oleh modal fisik maupun modal manusia yang diakselerasi oleh variabel produktifitas (Baroroh, 2012). Adanya sektor keuangan pada suatu daerah dapat memicu laju pergerakan ekonomi dengan pesat. Hal ini dengan adanya kontribusi pada sektor perbankan sebagai alat intermediasi dalam menyalurkan dana pada investasi produktif yang mendorong sektor riil sehingga akan menghasilkan output pertumbuhan secara agregat.

Kunci utama dari sektor keuangan khususnya lembaga perbankan yaitu kepercayaan oleh karena itu menurut (Sudrajat, 2015) menciptakan lembaga keuangan yang kokoh didukung oleh pertumbuhan aset yang signifikan, kemudian sebagai lembaga keuangan syariah dituntut untuk mengemban amanah dari pemilik dana agar dapat menyalurkan dananya untuk usaha yang produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Afandi dan Amin, 2019) indikator utama perbankan Islam mencakup jumlah

lembaga, jumlah kantor, total aset, dana pihak ketiga, total pembiayaan dan pangsa pasar. Sektor keuangan menjadi mesin penggerak bagi pertumbuhan sektor riil yang dapat memobilisasi tabungan.

Sektor usaha di Indonesia masih didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan memacu pertumbuhan sektor usaha di daerahnya. Menurut (Gina *dkk.*, 2015) peran UMKM memiliki daya dalam penyerapan tenaga kerja yang sangat besar yaitu 99,9% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sehingga meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu daerah terdapat kontribusi dana dari masyarakat yang diserap dari sektor perbankan, semakin besar dana yang diserap maka akan meningkatkan produksi. Kemudian peningkatan produksi barang dan jasa akan meningkatkan pendapatan usaha yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah (Kornita *dkk.*, 2010). Pengembangan UMKM harus terus didorong agar tetap berkembang khususnya pemberian pembiayaan usaha yang mudah dari lembaga keuangan. Menurut (Supartoyo *dkk.*, 2018) Teori keuangan mikro menjelaskan bahwa tingginya kredit UMKM akan meningkatkan akses finansial yang mendorong UMKM dalam melakukan ekspansi usaha.

Namun, permasalahan UMKM ketika mengajukan pembiayaan pada sektor perbankan karena dinilai tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan atau disebut dengan tidak bankable. Padahal banyak UMKM yang memiliki prospek usaha yang bagus. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan akses pembiayaan UMKM dapat mengakses pembiayaan usaha pada lembaga keuangan mikro yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dapat menjangkau masyarakat di sektor UMKM. Selain itu, sistem pembiayaan yang menggunakan sistem bunga berakibat pada kesulitan UMKM dalam mengembalikan dananya karena peningkatan suku bunga sehingga UMKM membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung para UMKM yaitu dengan sistem bagi hasil (Maryati, 2014). Menurut (Nafik *dkk.*, 2018) di dalam sistem perbankan nasional, salah satu bank yang bergerak di sektor mikro yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. BPRS hanya berfokus melayani Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) yang memiliki proses yang mudah, pelayanan yang cepat, dan persyaratan yang mudah (Bank Indonesia, 2008).

BPRS sendiri memiliki pangsa pasar yang berbeda dengan Bank Umum Syariah dan lembaga keuangan lainnya yang dapat dijangkau oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dimana ketika penyaluran pembiayaan oleh BPRS terdistribusi secara baik di sektor produktif, maka sektor produktif atau sektor riil pun akan mengalami peningkatan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Berdasarkan teori makroekonomi persediaan modal meningkat disebabkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi pada sektor riil akan mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2013). Adanya peningkatan investasi dan tambahan modal usaha yang bersumber dari perbankan syariah akan meningkatkan produksinya yang berdampak pada pendapatan UMKM yang bertambah, kemudian menurut (Tanjung *dkk.*, 2007) peningkatan produksi akan berdampak pada perluasan usaha yang akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat menekan angka pengangguran, jumlah tenaga kerja bertambah akan meningkatkan pendapatan perkapita, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional. Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini menganalisis pengaruh dan sejauh mana sektor keuangan berupa BPRS terhadap perekonomian regional di pulau Jawa.

KAJIAN TEORI

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga peningkatan PDRB per kapita yang dicapai suatu daerah disebut sebagai suatu kesuksesan bagi daerah tersebut dalam pembangunan ekonomi (Sukirno, 1981). Menurut (Prishardoyo, 2008) PDRB merupakan indikator ekonomi makro yang memberikan gambaran terhadap keadaan perekonomian suatu wilayah. Menurut (Patrick, 1966) terdapat dua kemungkinan hubungan antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) *demand-following*, rendahnya pertumbuhan sektor keuangan merupakan wujud dari kurangnya permintaan terhadap jasa keuangan. (2) *Supply-leading*, merupakan sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Sehingga adanya sektor keuangan sebagai respon dari permintaan jasa keuangan dari pemilik dana pada sektor riil. Pada saat perekonomian di sektor riil tumbuh maka permintaan jasa keuangan akan bertambah, semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkemabangan sektor keuangan menjadi positif.

Total Aset. Pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi merupakan dukungan dari pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah peningkatan pertumbuhan perbankan syariah didukung pula oleh peningkatan permodalan bank syariah, likuiditas yang cukup, dan membaiknya kualitas pembiayaan, tingkat efisiensi, dan rentabilitas syariah (OJK, 2107). Menurut (Patrick, 1966) pembentukan institusi finansial modern, aset liabilitas, dan berbagai jasa keuangan merupakan respon dari peningkatan permintaan jasa keuangan oleh penyalur dana di sektor riil. Saat ekonomi riil tumbuh maka permintaan jasa keuangan akan bertambah, sehingga semakin banyak pengguna jasa keuangan maka akan berdampak positif bagi perkembangan sektor keuangan. Pertumbuhan aset BPRS akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan market share perbankan syariah kemudian akan berdampak terhadap pertumbuhan perbankan nasional, dan ketika perbankan nasional tumbuh positif diharapkan memberikan kontribusi pada aktivitas perekonomian di Indonesia (OJK, 2017). Berdasarkan hasil penelitian dari (Supartoyo *et al.*, 2018) bahwa aset BPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Sulawesi. Sejalan dengan penelitian (Baroroh, 2012) bahwa aset perbankan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Jawa. Namun berbeda dengan (Putra, 2018) menunjukkan hasil bahwa variabel total aset perbankan syariah signifikan akan tetapi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Total Pembiayaan. Menurut (Nugrohowati *dkk.*, 2019) pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan salah satu kegiatan utama untuk mendapatkan pendapatan bagi perbankan. Peraturan Bank Indonesia No 14/22/PBI/2012 tentang pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPPI & BI, 2015). Pembiayaan yang diberikan dari perbankan syariah untuk pembiayaan produktif dalam perekonomian memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi. menurut (Supartoyo *dkk.*, 2018) kredit produktif mendorong pertumbuhan ekonomi karena digunakan untuk pendirian, modernisasi, rehabilitasi, dan ekspansi usaha. Hal ini berkaitan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional. Mekanisme kebijakan moneter dapat

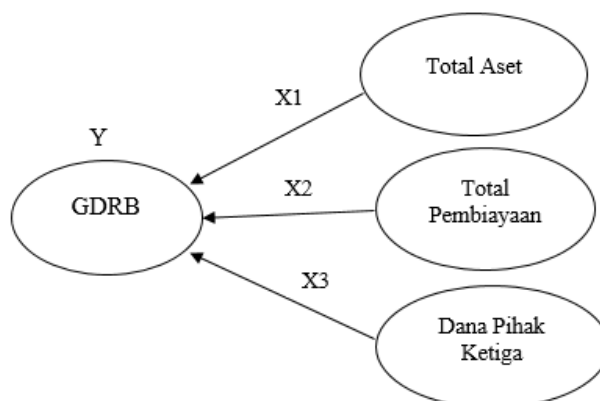
mempengaruhi pendapatan nominal dan kegiatan sektor riil secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian dari (OJK, 2015) bahwa kredit yang disalurkan pada kelima sektor ekonomi tersebut, secara umum berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi. Sejalan dengan penelitian (Supartoyo *dkk.*, 2018) dan (Baroroh, 2012) jumlah pembiayaan yang disalurkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional baik di Sulawesi maupun di Jawa.

Dana Pihak Ketiga (DPK). Perkembangan dan pertumbuhan perbankan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat (Huda, 2010). Dana Pihak Ketiga merupakan dana dari simpanan masyarakat yang dijadikan bank sebagai sumber dana dalam membiayai operasionalnya. (Hutagalung, 2019) menyatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Sejalan dengan yang dipaparkan oleh (Widiarti *et al.*, 2015) bahwa pendanaan perbankan terbesar yaitu terletak pada dana pihak ketiga (DPK) selain pendanaan jangka panjang melalui obligasi atau *Medium Term Note* (MTN). Menurut (Supartoyo *et al.*, 2018) simpanan masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan sebuah bank jika dapat membiayai operasionalnya dengan sumber dana tersebut. Kinerja perbankan syariah maupun BPRS ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, yang menunjukkan perbaikan pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan hasil penelitian (Hasyim, 2016) bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. Sejalan dengan penelitian (Supartoyo *dkk.*, 2018) dan (Baroroh, 2012) bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional baik di Sulawesi maupun di Jawa.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, dengan metode regresi panel data dengan menggunakan alat Eviews 9 yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Y), Total Aset (X1), Total Pembiayaan (X2), Dana Pihak ketiga (DPK) (X3). Data yang digunakan berupa data panel. Sampel data dalam bentuk bulanan mencakup periode Januari 2016 hingga Desember 2018. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan Adapun model hipotesisnya sebagai berikut.

Gambar 2. Model Hipotesis Penelitian



ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow. Uji Chow merupakan teknik untuk mengetahui teknik regresi data panel mana yang lebih baik antara model *Fixed Effect* dengan model *Common Effect*. Jika nilai *significant* > 0,05 maka modal yang digunakan adalah *Common Effect*. Namun jika nilai *significant* < 0,05 maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

Tabel 1. Chow Test

Effect Test	Statistic	Value of Significancy	Informtion
Cross-section F	6317.054555	0.0000	Signifikan
Cross-section Chi-square	1087.400106	0.0000	Signifikan

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 1. hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa *cross section Chi-Square* sebesar 1087.400106 dengan nilai signifikan 0.0000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih baik menggunakan model *Fixed Effect*.

Uji Hausman. Uji Hausman merupakan teknik untuk mengetahui teknik regresi data panel mana yang lebih baik antara model *Fixed Effect* dengan model *Random Effect*. Jika nilai *significan* > 0,05 maka modal yang digunakan adalah model *Random Effect*. Jika nilai *significan* < 0,05 maka model yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

Tabel 2. Hausman Test

Test Summary	Statistic	Value of Significancy	Information
Cross-section random	0.480833	0.9231	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 2. hasil dari uji Hausman menunjukkan bahwa *cross section Chi-Square* sebesar 0.480833 dengan nilai signifikan 0.9231 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih baik menggunakan model *Random Effect*.

Berdasarkan hasil uji Chow, Uji Hausman, dan mempertimbangkan data lebih banyak data time series dibandingkan cross section maka model yang diambil yaitu *Fixed Effect Model*.

Analisis Regresi. Hasil analisis dari koefisien dan nilai signifikasi terdapat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil dari Analisa Regresi Data Panel

Variable	Path Coefficient	t-Stat	Sig	Information
Total Asset	-29.72800	-3.176330	0.0017	Signifikan
Total Pembiayaan	10.50549	0.788742	0.4311	Tidak Signifikan
Dana Pihak Ketiga	15.41527	1.568954	0.1181	Tidak Signifikan
R-Squared	0.145430			
F-Statistic	12.02595			
Prob (F-Statistic)	0.000000			Signifikan

Sumber: Data diolah (2019)

Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen terdapat pada Tabel 4. (1) Secara parsial variabel total aset menghasilkan nilai t-statistik sebesar -3176330 dan nilai probabilitas sebesar $0.0017 < 0.05$, maka variabel total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDRB. Artinya Total aset pada BPRS di pulau Jawa memiliki hubungan tidak searah dengan GDRB, dimana ketika total aset di BPRS pulau Jawa mengalami kenaikan maka total GDRB mengalami penurunan. Total aset yang mengindikasikan ukuran bank, menggambarkan strategi, dan kegiatan manajemen perbankan yang berhubungan dengan pengelolaan dana bank seperti penggunaan dana untuk penyedia kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka panjang maupun pendek serta aktiva tetap perbankan tersebut (Nugrohowati *dkk.*, 2019). Oleh karena itu, ketika total aset BPRS di pulau Jawa berhubungan terbalik dengan GDRB, berarti aset yang dikelola BPRS di pulau Jawa hanya berdampak kecil pada sektor riil dan tidak berkontribusi pada GDRB di pulau Jawa.

Secara parsial variabel total pembiayaan menghasilkan nilai t-statistik sebesar 0.788742 dan nilai probabilitas sebesar $0.4311 > 0.05$, maka variabel total pembiayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRB. Artinya ketika total pembiayaan di BPRS pulau Jawa mengalami kenaikan atau penurunan tidak berpengaruh terhadap GDRB di pulau Jawa, dimana setiap pembiayaan yang didistribusikan oleh BPRS di pulau Jawa tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Oleh karena itu hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah maupun pihak terkait bahwa lembaga keuangan mikro syariah di pulau Jawa tidak begitu berdampak pada pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil. Berdasarkan hal tersebut berarti penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Baroroh, 2012) yang menyatakan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa.

Menurut (Cahyaningrum, 2017) Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menekankan konsep *asset & production based system* (sistem berbasis aset dan produksi) sebagai penopang utamanya. Mudharabah dan musyarakah adalah cerminan utama dari perbankan syariah. Melalui pola pembiayaan syariah maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Berdasarkan data (BPS, 2018) bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS lebih banyak pada pembiayaan murabahah

dibandingkan dengan mudharabah dan muasyarakah, dilihat data per Desember 2018 untuk seluruh BPRS di Indonesia total pembiayaan Rp 258.617 miliar sedangkan total pembiayaan Mudharabah Rp 2.750 miliar dan musyarakah Rp 5.189 miliar sehingga pembiayaan lebih banyak pada pembiayaan murabahah bukan pada mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil.

Menurut (Beik, 2016) pertumbuhan ekonomi selain bertumpu kepada sektor riil juga didukung oleh keuangan syariah. Dalam teorinya, keuangan syariah diibaratkan sebagai oli mesin yang dapat melancarkan jalannya perkembangan sektor riil dalam menggerakkan roda perekonomian, sedangkan yang dapat mengembangkan sektor riil adalah pada transaksi mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, total pembiayaan tidak berpengaruh pada GDRB di pulau Jawa .

Secara parsial variabel dana pihak ketiga menghasilkan nilai t-statistik sebesar 1.568954 dan nilai probabilitas sebesar $0.1181 > 0.05$, maka variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRB. Artinya ketika dana pihak ketiga mengalami kenaikan ataupun penurunan tidak berpengaruh pada total GDRB. Menurut (Cahyaningrum, 2017) Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga yang dialokasikan pada sektor-sektor riil maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian. Hal ini karena dana pihak ketiga sebagai penopang bagi roda pergerakan operasional BPRS, ketika dana pihak ketiga tidak dapat disalurkan pada sektor preproduktif maka tidak akan berdampak pada sektor riil, sehingga dana pihak ketiga yang di kelola oleh BPRS tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu dana pihak ketiga di BPRS orientasinya hanya dalam bentuk simpanan dalam jangka pendek bukan dalam bentuk pembiayaan dalam jangka panjang hal ini sejalan dengan penjelasan dari (Syafri, 2015) bahwa dana pihak ketiga di lihat dari sisi liabilitas didominasi oleh sumber dana jangka pendek yaitu dalam bentuk deposito.

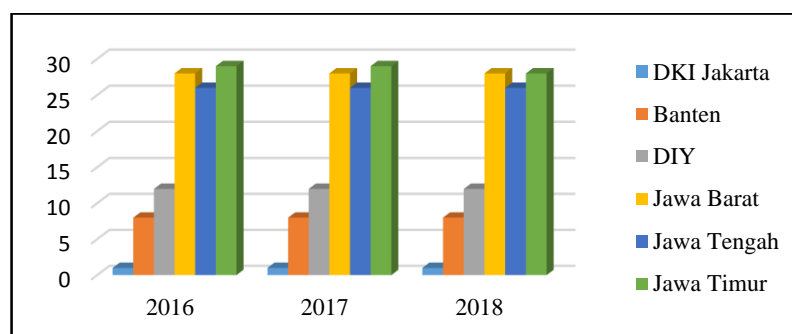
Sedangkan pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau secara simultan menghasilkan nilai F-Statistik sebesar 12.02595, dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000 lebih kecil dari 0.05 maka disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRB se pulau Jawa. Kemudian berdasarkan tabel 4. R-Square menghasilkan 0.145430 (14%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga dapat memberikan kontribusi sebesar 14% pada *Gross Domestik Regional Bruto* di pulau Jawa dan 86% diberikan oleh variabel lainnya. Artinya semakin tinggi nilai total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga BPRS secara bersama-sama maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula, dan sebaliknya apabila keuangan syariah pada BPRS turun maka pertumbuhan ekonomi akan turun.

Hal ini berarti aset BPRS di pulau Jawa, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa, dan juga keberlangsungan sektor riil di pulau Jawa. BPRS memiliki pengaruh terhadap PDRB dikarenakan BPRS fokus mengalokasikan dananya pada sektor riil atau sektor produktif. Dalam teorinya menurut (Beik, 2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi didukung oleh keuangan syariah, keuangan syariah tersebut diibaratkan sebagai oli mesin yang dapat melancarkan jalannya perkembangan sektor riil dalam menggerakkan roda perekonomian. Sejalan dengan penelitian (Cahyaningrum, 2017) menunjukkan bahwa keuangan syariah pada BPRS berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sejalan dengan penelitian (Baroroh, 2012) bahwa aset, kredit, dan dana pihak

ketiga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Jawa, dan sesuai dengan (Levine, 1997) menyatakan bahwa variabel aset dan kredit menunjukkan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun untuk pengujian berdasarkan setiap provinsi akan berbeda dengan keseluruhan pulau Jawa karena setiap provinsi memiliki jumlah BPRS yang berbeda-beda seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3. Jumlah BPRS di Pulau Jawa



Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan gambar 3. Pada tahun 2016 yang paling banyak memiliki BPRS di Jawa Timur dengan jumlah BPRS sebanyak 29 BPRS kemudian disusul oleh provinsi Jawa Barat sebanyak 28 BPRS, dan yang paling sedikit yaitu di provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 BPRS hal ini menurut (Natih, 2015) Jawa Barat merupakan provinsi dimana berdekatan dengan Ibukota yaitu Jakarta hal ini kemungkinan banyaknya BPRS di Jawa Barat karena menjadi daerah limpahan dari Ibu Kota, ditahun 2017 masih sama dengan tahun 2016. Dan ditahun 2018 BPRS Jawa Timur mengalami pengurangan menjadi 28 seimbang dengan jumlah BPRS di Jawa Barat. Berdasarkan perbedaan jumlah BPRS ini oleh karena itu berikut pengujian pengaruh total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga terhadap GDRB di setiap provinsi sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil dari Analisis Regresi di Setiap Provinsi

Province	R-Square	F-Statistic	Prob	Information
DKI Jakarta	0.608625	16.58768	0.000001	Signifikan
Banten	0.898611	94.53874	0.000000	Signifikan
DIY	0.896960	92.85341	0.000000	Signifikan
Jawa Barat	0.898528	94.45215	0.000000	Signifikan
Jawa Tengah	0.877520	76.42203	0.000000	Signifikan
Jawa Timur	0.863604	67.53718	0.000000	Signifikan

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5. Secara simultan setiap provinsi memiliki pengaruh terhadap GDRB di setiap provinsi masing-masing dan R-Square yang terbesar di provinsi Banten sebesar 0.898611 (90%), kemudian Jawa Barat sebesar 0.898528 (90%). Walaupun provinsi Banten hanya memiliki 8 BPRS namun BPRS di provinsi Banten berkontribusi besar

terhadap GDRB di Provinsi Banten, sedangkan jika provinsi Jawa Barat dari jumlah BPRS memang paling banyak dibanding provinsi lain setelah Jawa Timur sehingga terlihat wajar jika memiliki kontribusi besar terhadap GDRB, dilihat dari (BPS, 2018) Total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiganya pun paling besar jumlahnya. Dismaping itu, R-Square yang paling kecil pada provinsi DKI Jakarta sebesar 0.608625 (61%), Artinya BPRS di provinsi DKI Jakarta hanya memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap GDRB di provinsi Jakarta, hal ini kecilnya kontribusi BPRS DKI Jakarta dibanding kan dengan provinsi lain disebabkan oleh sedikitnya BPRS yang ada di provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta memiliki BPRS yang paling sedikit dalam 3 tahun terakhir, memberikan hasil secara parsial bahwa total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDRB di provinsi DKI Jakarta, secara parsial variabel total pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap GDRB di provinsi DKI Jakarta, secara parsial variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap GDRB Di provinsi DKI Jakarta. Sedangkan secara simultan variabel total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap GDRB di provinsi DKI Jakarta. Kemudian berdasarkan hasil R-Square menghasilkan sebesar 0.608625 (61%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga BPRS di provinsi DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi sebesar 61% pada Gross Domestik Regional Bruto di provinsi DKI Jakarta dan 39% diberikan oleh variabel lainnya.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi di Provinsi DKI Jakarta

Variable	Path Coefficient	t-Stat	Sig	Information
Total Aset	-91653.17	-2.779784	0.0090	Signifikan
Total Pembiayaan	-26483.52	-1.542895	0.1327	Tidak Signifikan
Dana Pihak Ketiga	334063.2	6.200134	0.0000	Signifikan
R-Squared	0.608625			
F-Statistic	16.58768			
Prob (F-Statistic)	0.000001			Signifikan

Sumber: (Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 5. BPRS di Provinsi DKI Jakarta memiliki BPRS yang paling sedikit dalam 3 tahun terakhir, memberikan hasil secara parsial bahwa total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDRB di provinsi DKI Jakarta, secara parsial variabel total pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap GDRB di provinsi DKI Jakarta, secara parsial variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap GDRB Di provinsi DKI Jakarta. Sedangkan secara simultan variabel total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap GDRB di provinsi DKI Jakarta. Kemudian berdasarkan hasil R-Square menghasilkan sebesar 0.608625 (61%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga BPRS di provinsi DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi sebesar 61% pada Gross Domestik Regional Bruto di provinsi DKI Jakarta dan 39% diberikan oleh variabel lainnya.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi di Provinsi Banten

BPRS Provinsi Banten				
Variable	Path Coefficient	t-Stat	Sig	Informatio
Total Aset	2.137338	8.625968	0.0000	Signifikan
Total Pembiayaan	-0.526578	-4.287735	0.0002	Signifikan
Dana Pihak Ketiga	1.760383	-5.265386	0.0000	Signifikan
R-Squared	0.898611			
F-Statistic	94.53874			
Prob (F-Statistic)	0.000000			Signifikan

Sumber: (Data diolah, 2019)

BPRS di Provinsi Banten, memberikan hasil secara parsial bahwa total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRB di provinsi Banten, secara parsial variabel total pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDRB di provinsi Banten, secara parsial variabel dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDRB Di provinsi Banten. Sedangkan secara simultan variabel total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap GDRB di provinsi Banten. Kemudian berdasarkan hasil R-Square menghasilkan sebesar 0.898611 (90%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga BPRS di provinsi Banten dapat memberikan kontribusi sebesar 90% pada Gross Domestik Regional Bruto di provinsi Banten dan 10% diberikan oleh variabel lainnya.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi di Provinsi DIY

BPRS Provinsi DIY				
Variable	Path Coefficient	t-Stat	Sig	Information
Total Aset	-23317.32	-0.218854	0.0000	Signifikan
Total Pembiayaan	7127.518	0.190467	0.8282	Tidak Signifikan
Dana Pihak Ketiga	123945.7	0.750168	0.4586	Tidak Signifikan
R-Squared	0.896960			
F-Statistic	92.85341			
Prob (F-Statistic)	0.000000			Signifikan

Sumber: (Data diolah, 2019)

(3) BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan hasil secara parsial bahwa total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDRB di provinsi DIY, secara parsial variabel total pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap GDRB di provinsi DIY, secara parsial variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap GDRB Di provinsi DIY. Sedangkan secara simultan variabel total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap GDRB di provinsi DIY. Kemudian berdasarkan hasil R-Square menghasilkan sebesar 0.896960 (90%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga BPRS di provinsi DIY dapat memberikan kontribusi sebesar 90% pada Gross Domestik Regional Bruto di provinsi DIY dan 10% diberikan oleh variabel lainnya.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi di Provinsi Jawa Barat

BPRS Provinsi Jawa Barat				
Variable	Path Coefficient	t-Stat	Sig	Information
Total Aset	-0.000402	-2.060333	0.0476	Signifikan
Total Pembiayaan	0.000476	3.364699	0.0020	Signifikan
Dana Pihak Ketiga	0.000467	3.298411	0.0024	Signifikan
R-Squared	0.898528			
F-Statistic	94.45215			
Prob (F-Statistic)	0.000000			Signifikan

Sumber: (Data diolah, 2019)

(4) BPRS di Jawa Barat, memberikan hasil secara parsial bahwa total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDRB di provinsi Jawa Barat, secara parsial variabel total pembiayaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap GDRB di provinsi Jawa Barat, secara parsial variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif secara signifikan terhadap GDRB Di provinsi Jawa Barat. Sedangkan secara simultan variabel total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap GDRB di provinsi Jawa Barat. Kemudian berdasarkan hasil R-Square menghasilkan sebesar 0.898528 (90%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga BPRS di provinsi Jawa Barat dapat memberikan kontribusi sebesar 90% pada Gross Domestic Regional Bruto di provinsi Jawa Barat dan 10% diberikan oleh variabel lainnya.

Provinsi Jawa Barat termasuk memiliki BPRS terbanyak di pulau Jawa dengan total aset terbesar pertama di pulau Jawa Namun total aset secara parsial berhubungan terbalik dengan total GDRB, artinya banyaknya total aset yang dimiliki oleh BPRS di Jawa Barat tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Namun jika ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama akan mempengaruhi GDRB artinya pada hakikatnya BPRS di Jawa Barat memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil karena Jawa Barat memiliki BPRS yang banyak walau pun tidak seluruh kabupaten/kota ada akses terdekat dengan BPRS. Hal ini pun sejalan dengan banyaknya BPRS di Jawa Barat sehingga masyarakat sudah banyak tersentuh dengan BPRS di provinsi Jawa Barat, begitu pula selaras dengan penjelasan dari (Setiawan *dkk.*, 2019) bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki tradisi ekonomi yang sejalan dengan yang dipraktikkan dalam perbankan syariah yaitu dengan istilah *paro* atau *negahkeun* artinya meraju pada kerjasama ekonomi yang menggunakan sistem bagi hasil.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi di Provinsi Jawa Tengah

BPRS Provinsi Jawa Tengah				
Variable	Path Coefficient	t-Stat	Sig	Information
Total Aset	0.089312	9.662327	0.0000	Signifikan
Total Pembiayaan	0.059657	4.247839	0.0002	Signifikan
Dana Pihak Ketiga	-0.013073	-0.719017	0.4773	Tidak Signifikan
R-Squared	0.877520			
F-Statistic	76.42203			
Prob (F-Statistic)	0.000000			

Sumber: (Data diolah, 2019)

(5) BPRS di Provinsi Jawa Tengah, memberikan hasil secara parsial bahwa total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRB di provinsi Jawa Tengah, secara parsial variabel total pembiayaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap GDRB di provinsi Jawa Tengah, secara parsial variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap GDRB Di Jawa Tengah. Sedangkan secara simultan variabel total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap GDRB di provinsi Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan hasil R-Square menghasilkan sebesar 0.877520 (88%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga BPRS di provinsi DIY dapat memberikan kontribusi sebesar 88% pada Gross Domestic Regional Bruto di provinsi Jawa Tengah dan 12% diberikan oleh variabel lainnya.

GDRB Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan GDRB terendah dibandingkan di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, menurut (Putri dan Poerwono, 2013) sehingga diperlukan pematik agar GDRB di Jawa Tengah dapat menyusul provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur salah satunya dengan pengelolaan UMKM dengan baik. Berdasarkan hasil diatas dana pihak ketiga lah yang tidak berpengaruh pada GDRB atau pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah artinya dana pihak ketiga tidak memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, sehingga dana pihak ketiga BPRS di Jawa Tengah belum beroperasi secara optimal. Menurut (Fauzi, 2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang menjadi variabel inputnya menjadi salah satu sumber inefisiensi pada BPRS di Jawa Tengah karena kurang maksimal dalam penggunaannya. Sehingga BPRS di Jawa tengah perlu untuk meningkatkan pelayanan dan jasa perbankan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan dana pihak ketiga dengan tingkat bagi hasil yang wajar.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi di Provinsi Jawa Timur

BPRS Provinsi Jawa Timur				
Variable	Path Coefficient	t-Stat	Sig	Information
Total Aset	0.569800	2.591782	0.0143	Signifikan
Total Pembiayaan	-0.008381	-0.034144	0.9730	Tidak Signifikan
Dana Pihak Ketiga	0.004447	0.120186	0.9051	Tidak Signifikan
R-Squared	0.863604			
F-Statistic	67.53718			
Prob (F-Statistic)	0.000000			

Sumber: (Data diolah, 2019)

(6) BPRS di Provinsi Jawa Timur, memberikan hasil secara parsial bahwa total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRB di provinsi Jawa Timur, secara parsial variabel total pembiayaan tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap GDRB di provinsi Jawa Timur, secara parsial variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap GDRB Di Jawa Timur. Sedangkan secara simultan variabel total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap GDRB di provinsi Jawa Timur. Kemudian berdasarkan hasil R-Square menghasilkan sebesar 0.863604 (86%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga BPRS di provinsi Jawa Timur dapat memberikan kontribusi sebesar 86% pada Gross Domestik Regional Bruto di provinsi Jawa Timur dan 14% diberikan oleh variabel lainnya.

Berdasarkan hasil diatas artinya di Provinsi Jawa Timur memiliki aset yang memumpuni untuk memberikan kontribusi lebih untuk pertumbuhan ekonomi karena provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi terbesar di pulau Jawa, namun pembiayaan dan dana pihak ketiga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur artinya terdapat ketimpangan yang tinggi dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat, hal ini sesuai dengan penjelasan dari (Amalia *et al.*, 2018) bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tingkat ketimpangan yang tinggi berdasarkan perhitungan indeks williamson antar daerah di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dari ketimpangan ini maka sebaiknya BPRS di Jawa Timur lebih fokus pada pengelolaan dana pihak ketiga dan pemberian pembiayaan dan pada UMKM agar modal tidak berputar pada orang-orang yang memiliki dana besar dan pebisnis besar.

KESIMPULAN

Sektor keuangan di suatu daerah dapat memacu laju pergerakan ekonomi, khususnya dengan adanya kontribusi perbankan di sektor mikro sebagai alat intermediasi dalam menyalurkan dana pada investasi produktif yang mendorong sektor riil khususnya di sektor mikro sehingga akan menghasilkan output pertumbuhan secara agregat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkeekonomian di pulau Jawa

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda uji T menunjukkan bahwa secara parsial variabel total aset berpengaruh negatif secara signifikan terhadap GDRB di pulau Jawa, secara parsial variabel total pembiayaan dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap GDRB di pulau Jawa Berdasarkan uji F, secara simultan variabel total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRB di pulau Jawa dengan nilai R-Square menghasilkan 0.145430 (14%) sehingga disimpulkan bahwa total aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga dapat memberikan kontribusi sebesar 14% pada Gross Domestik Regional Bruto di pulau Jawa dan 86% diberikan oleh variabel lainnya. Artinya BPRS di pulau Jawa masih sangat sedikit kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu hal ini menjadi catatan bagi pemerintah agar lebih memberikan kemudahan agar semakin banyak BPRS berdiri di pulau Jawa, karena BPRS sendiri sebenarnya memiliki kontribusi bagi GDRB walaupun hanya 14%, mungkin saja jika semakin banyaknya BPRS akan berkontribusi lebih besar lagi terhadap GDRB. Sedangkan

untuk praktisi BPRS agar lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengelola BPRS dan meningkatkan kinerja BPRS khususnya pada pembiayaan pada sektor produktif.

REFERENSI

- Afandi, Muhammad Anif. Amin, Muhammad.(2019). Islamic Bank Financing and Its Effect on Economic Growth: A Cross Province Analysis. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 8 (2) hal 243-250.
- Amalia, Sri Karima. Santoso, Dwi Budi. Sasongko (2018) Convergence Analisis of Economic Growth in East Java. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol 1 hal 151-161.
- Baroroh, Utami. (2012). Analisis Sektor Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine. *Jurnal Etikonomi* Vol. 11 No. 2.
- Beik, Irfan Syauqi (2016) *Ekonomi pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyaningrum, Ina Sholati. (2017). Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014. *AN-NISBAH*, Vol. 04, No. 01.
- Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK (2015) *Ekonomi Pemerintah Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah*. <https://www.ojk.go.id>
- Fauzi, Mahmud. (2018). Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 4 No. 1 hal 31-40.
- Gina, Widya. Effendi, Jaenal (2015) Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 3, No. 1.
- Hasyim, Linda Tamim Umairah (2016) Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol 8 No 1 hal 11-27.
- Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hutagalung. Muhammad Wandisyah R. (2019). Pengaruh *Non performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Return on Asset* Dimoderasi oleh Variabel Inflasi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. Volume 7 Nomor 1 hal 149-161.
- Levine, Ross (1997) Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. *Journal of Economic Literature*, Vol. 35, No. 2 pp. 688-726.
- Kornita, Sri Endang. Mayes, Anthony (2010) Analisis Peran perbankan dalam Perekonomian di Kabupaten Siak. *Jurnal Ekonomi*.
- Maryati, Sri. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatra Barat. *Economica Journal of Economic and Economic Education* Vol.3 No.1 (1-17)
- Mankiw, N. G. (2013.) *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nafik H R, Muhamad; Wahyudi, Roiful. (2018). *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press.
- Natih, Putu Geniki Lavinia (2015) Technical Efficiency Levels of Rural Banks (BPRS) in West Java: A Stochastic Frontier Approach. *Economics and Finance in Indonesia* Vol. 61 No. 3.

- Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini, Bimo, Syafrildha (2019) Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2017) Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia.
- Patrick, Hugh T. (1966). Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries. *Economic Development and Cultural Change. The University of Chicago Press*. Vol. 14, No. 2 pp. 174-189.
- Putri, Hera Pradipta dan Poerwono, Dwisetia (2013) Faktor Internal dan Faktor Eksternal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2010. *Dipenogoro Journal of Economics* Volume 2, Nomor 4.
- Putra, Rendy Okryandi. (2018). Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- Presiden Republik Indonesia (2004) Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Prishardoyo, Bambang.(2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *Jejak*, Volume 1 Nomer 1.
- Setiawan, Iwan. Jubaedah, Dedah. Yuniarti, Vinna Sri (2019) Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Volume I Nomor 02.
- Sudrajat, Anton (2015) Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa Tahun 2014. *Islamic Economics Journal*. Volume 1 Nomor 1.
- Sukirno, Sadono. (1981). *Pengantar Ekonomika Makro*. Jakarta: FEUI.
- Syafrida, Ida. Aminah, Indianik (2015) Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Supartoyo, Yesi Hendriani; Juanda, Bambang; Firdaus, Muhammad; Effendi, Jaenal. (2018). Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan* Volume 2 Nomor 1.
- Tim Studi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif RI. (2015) *Ekonomi Kreatif : Rencana Pengembangan TV dan Radio Nasional 2015-2019*. PT Republik Solusi.
- Tanjung, H., Perwaatmadja, dan Karnaen, A. (2007) *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta, Celestial Publishing.
- Widiarti, Astoeti Wahjoe. Siregar, Hermanto. Andati, Trias. (2015). The Determinants of Bank's Efficiency in Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*. Volume 18 No 2.
- <https://www.bps.go.id/>
- <https://www.bi.go.id/id>